**COVID-19 MERUBAH WAJAH INDONESIA, LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN UMKM SELAMA PANDEMI**

Rika Desiyanti, SE., M.Si,Ph.D (Cand)

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

Email: [rikadesiyanti@bunghatta.ac.id](mailto:rikadesiyanti@bunghatta.ac.id)

Dan

Dr. Hamirul, S.T.,M.Pd

Dosen Ilmu Administrasi negara STIA Setih Setio Muara

Bungo [hrul@ymail.com](mailto:hrul@ymail.com)



Buku Perguruan Tinggi **CV. Pustaka Learning Center**

**M A L A N G**

**COVID-19 MERUBAH WAJAH INDONESIA, LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN UMKM SELAMA PANDEMI**

Penulis Rika Desiyanti, SE., M.Si,Ph.D (Cand) Dr. Hamirul, S.T.,M.Pd

ISBN 978-623-6591-10-9

**Cetakan Pertama,** September 2020

Penyunting : Misbahul Munir, Umi Salamah

Desain Sampul : Chusni Maulana Ikhsan

Desain Layout : Afsheen Freya Calya Arsakyla, M. P. Ammar Fayyadh

**Penerbit :**

**CV. Pustaka Learning Center**

Karya Kartika Graha A.9 Malang 65132

Whatsapp 08994458885

Email: [pustakalearningcenter@gmail.com](mailto:pustakalearningcenter@gmail.com)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis tanpa izin Tertulis dari penulis dan Penerbit Pustaka Learning Center

**Kata Pengantar**

Buku ini terdiri dari dua bagian, dimana bagian pertma adalah membahas tentang literasi dan inklusi keuangan UMKM dimasa pandemic covid-19 ditulis ole Rika Desiyanti, S.E.,M.Si, Ph.D (Cand) dan bagian kedua membahas tentang Covid-19 merubah wajah Indonesia di tulis oleh Dr. Hamirul, S.T.,M.Pd. Pada buku kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Rika Desiyanti, S.E.,M.Si, Ph.D yang telah sudi berkolaborasi dalam menyelesaikan buku ini sehingga menjadi lebih berwarna dan untuk Pustaka Learning Center (PLC) penulis berdua mengucapkan banyak terima kasih atas diterbitkannya tulisan kami berdua dan harapan kami berdua semoga buku ini dapat bermanfaat serta mampu membuka cakrawala baru dalam bidang ilmu pengetahuan ditengah pandemi covid-19 yang tengah dihadapi saat ini dan semoga kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini.

**Penulis**

**Daftar Isi**

**Kata Pengantar ~ iii**

**Daftar Isi ~ iv**

**BAB I Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM dimasa**

**Pandemi Covid-19 ~ 1**

A. Literasi Keuangan ~ 1

B. Inklusi Keuangan ~ 8

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ~ 10

1. Definisi UMKM ~ 10

2. Peran Dan Fungsi UMKM ~ 14

3. Peran UMKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi ~ 16

D. Kendala UMKM Dan Solusi ~ 18

E. Kondisi UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 ~ 22

F. Literasi Keuangan UMKM ~ 25

G. Inklusi Keuangan UMKM Pada Pandemi Covid-19 ~ 27

H. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan UMKM Dalam Literasi

Dan Inklusi Keuangan ~ 28

1. Aliran Kas Masuk ~ 28

2. Aliran kas keluar ~ 29

3. Mengelola Piutang ~ 31

4. Mengelola Hutang ~ 37

**BAB II Peluang UMKM Dengan Menggunakan Inklusi**

**FINTECH Dimasa Pandemi Covid-19 ~ 40**

**BAB III Perilaku Covid-19 Merubah Administrasi Di**

**Indonesia ~ 44**

**BAB IV Covid-19 Merubah Wajah Ramadhan Dan**

**Lebaran ~ 51**

**BAB V Webinar Menjadi Sebuah Trand Di Masa Pandemi**

**Covid-19 ~ 57**

**BAB VI Covid-19 Mengubah Wajah Pendidikan ~ 62**

**BAB VII Covid-19 dan Dunia Kesehatan ~ 69**

**BAB VIII Penggunaan Masker dan APD ~ 73**

**Daftar Pustaka ~ 74**

**RIWAYAT PENULIS ~ 76**

**BAB I Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM dimasa**

**Pandemi Covid-19**

Literasi dan inklusi keuangan digaungkan menjadi program nasional di beberapa negara. Terdapatnya literasi keuangan yang masih rendah di negara maju, termasuk Indonesia. Kondisi ini merupakan masalah yang serius mengingat literasi keuangan penting untuk mengelola keuangan. Literasi keuangan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, terutama bagi usaha kecil menengah/UMKM, apa lagi di masa pandemi covid-19 ini. UMKM dianggap sebagai komponen penting dalam sektor bisnis. Mereka memiliki peran penting dalam membangun perekonomian suatu negara atau wilayah. Mereka telah menjadi salah satu prioritas untuk agenda pembangunan di Indonesia. UMKM tetap eksis ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah pada 1998. UMKM Indonesia tetap berdiri tegak disaat sebagian perusahaan besar gulung tikar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia

**A. Literasi Keuangan**

Literasi keuangan telah mendapatkan perhatian luas dari negara dan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir karena satu aspek mempengaruhi kinerja bisnis. Pengetahuan dan keterampilan keuangan adalah hal penting yang baik untuk membuat keputusan keuangan. Jika orang salah membuat keputusan keuangan maka akan ada efek berat dan jangka panjang. Literasi keuangan

membantu orang mendapatkan kesempatan untuk mengetahui dan mengaplikasikan dasar keuangan pribadi.

Literasi keuangan adalah pengetahuan dan

kemampuan dalam mengorganisir keuangan pribadi dan bisnis. Kecerdasan dan kemampuan manajemen keuangan adalah aspek penting dari kehidupan. Pengetahuan intelijen dan kemampuan manajemen keuangan adalah salah satu hal penting (Boehnke et al, 2018). Literasi keuangan dapat mencegah orang dari masalah keuangan. Melek keuangan menunjukkan kemampuan untuk medapatkan informasi keuangan dan keputusan dalam keuangan (Mandell, 2008; Rosacker & Rosacker, 2016).

Sebagaimana diungkapkan oleh Vitt et al. (2000) literasi keuangan adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, merencanakan keuangan, membuat keputusan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengkomunikasikan keuangan pribadi dan atau keluarga sehingga mempengaruhi kesejahteraan mereka (Brown et al., 2017; Fernandes et al., 2014; Miller et al., 2015; Kaiser

& Menkhoff, 2016; Grohmann, 2015). Literasi keuangan menyiratkan bahwa seseorang harus memiliki kapasitas, kepercayaan diri untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan keuangan yang baik merupakan salah satu bagian literasi keuangan yang penting. Keakuratan keputusan keuangan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Karenanya masyarakat perlu mendapatkankan pendidikan literasi keuangan yang baik. Diperlukan pendidikan literasi keuangan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Mihalcová et al (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan yang berkesinambungan yang dipengaruhi oleh usia, keluarga, budaya, dan tempat tinggal penduduk, pendidikan, dan sebagainya. Dalam dunia modern saat ini pentingnya kemampuan memproses informasi keuangan untuk menangani masalah kehidupan sehari-hari. Selain memiliki hak untuk mengakses informasi keuangan secara transparan, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap keuangan pribadinya. Setiap orang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola aset mereka sendiri.

Selanjutnya literasi keuangan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan tingkat keberhasilan usaha UMKM. Pemahaman dan kemampuan manajemen keuangan menjadi penting bagi kinerja keuangan usaha UMKM. Literasi keuangan akan meningkatkan pendapatan UMKM, pembangunan ekonomi daerah dan negara.

Ada beberapa survei tentang literasi keuangan di Indonesia. Menurut otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tingkat literasi keuangan di Indonesia. Menurut OJK (2013), bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. Well literate, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. Sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

3. Less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. Not literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan

terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan

Menurut (Praditya, 2016) Hanya 21, 8 persen literasi keuangan Indonesia memiliki kategori yang baik. Literasi finansial Malaysia 81 persen dari populasi. Thailand 78 persen dan Singapura bahkan memiliki 96 persen melek keuangan. Ada beberapa percepatan literasi keuangan. Pertama, memperluas jangkauan perbankan formal dan keuangan terkait dengan karakteristik negara kepulauan. Kedua, meningkatkan kapasitas literasi keuangan masyarakat menjadi layak. Ketiga perlunya bantuan jasa keuangan dalam hal pembiayaan/inklusi untuk usaha kecil menengah.

Selanjutnya terdapat hasil survey Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat melek finansial yang paling lemah, yaitu setelah India dan China. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berbeda pada tingkat literasi. Diperlukan efektivitas dan efisiensi untuk mengembangkan literasi keuangan.

Hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh

Mastercard, indeks literasi keuangan Indonesia masih

rendah. Hasil penelitian Indonesia menduduki peringkat ke-14 dan ditinggalkan dengan Malaysia yang menduduki peringkat ke-6. Riset Indonesia sendiri untuk mengetahui nilai literasi keuangan di kalangan masyarakat melalui OJK. Survey literasi keuangan Indonesia dilakukan menunjukkan bahwa hanya 21,84% atau seperlima dari populasi Indonesia yang sudah dikategorikan baik melek dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang memiliki pengetahuan keuangan yang cukup Survey yang dilakukan oleh OJK/otoritas jasa keuangan adalah 29,66% adalah masih rendah didunia. Menumbuhkan tingkat literasi keuangan pada masyarakat dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan harus menjadi nomor satu di antara ekonomi dan kebijakan sosial di negara.

Selain itu, literasi keuangan adalah elemen bagi semua orang untuk menghindari masalah keuangan. Masalah keuangan kesalahan terjadi dalam manajemen keuangan. Pengetahuan tentang literasi keuangan adalah hal yang paling diperlukan untuk mendapatkan kehidupan yang makmur. Pengendalian keuangan yang tepat didukung juga dibutuhkan untuk hasil maksimal. Kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat.

Manajemen keuangan mendorong melek finansial, sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat dengan tingginya tingkat pendapatan. Lusardi dan Mitchel (2014) menempatkan bahwa melek finansial merupakan kemampuan dan ilmu keuangan, yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola atau menggunakan uang untuk kehidupan yang lebih baik dan bertujuan untuk kesejahteraan keuangan. Penerapan literasi keuangan salah

satunya adalah mengelola keuangan mereka dan risiko keuangan. Asuransi dapat digunakan untuk menangani risiko keuangan. Masyarakat dapat menentukan jasa keuangan, produk, dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat harus memahami manfaat dan risiko, hak, kewajiban, layanan keuangan produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan manfaat yang besar, seperti: memilih dan memanfaatkan layanan keuangan investasi, mendapatkan pemahaman tentang produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan, memiliki keterampilan aplikasi perencanaan keuangan.

Aspek literasi keuangan meliputi beberapa aspek keuangan, yaitu:

1) Pengetahuan dasar keuangan pribadi mencakup pemahaman tentang beberapa hal yang paling mendasar dalam manajemen keuangan sebagai perhitungan suku bunga sederhana, senyawa bunga, inflasi, nilai waktu uang, likuiditas aset.

2) Aspek manajemen keuangan termasuk bagaimana seseorang mengelola uangnya serta menganalisa sumber pendapatan. Manajemen keuangan merupakan bidang terluas dan sangat penting untuk semua jenis perusahaan. Ada implikasi keuangan pada semua keputusan bisnis dan harus memiliki cukup ilmu keuangan ketika membuat analisis. Pengetahuan manajemen keuangan juga diperlukan oleh pebisnis. Pengelolaan keuangan adalah pengelolaan dana yang berkaitan dengan alokasi dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif serta upaya penggalangan dana untuk membiayai investasi

3) Manajemen kredit. Kurangnya pendanaan bagi UMKM akan menimbulkan hutang. Meningkatnya kebutuhan dan tuntutan hidup seperti rumah, kendaraan, dan biaya pendidikan, dengan menggunakan kredit dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi semua kebutuhan hidup. Sumber pendanaan dalam bentuk kredit dimana individu dapat mengkonsumsi barang dan jasa saat ini, dan membayar di masa depan. Penggunaan kredit harus dikelola dengan benar. Kredit dapat digunakan untuk membangun rumah/properti karena harga properti dapat mengimbangi inflasi. Kredit bisa membeli alat produksi dan modal kerja produktif lainnya.

4) Tabungan dan investasi, rekening tabungan adalah bagian dari pendapatan individu yang tidak digunakan untuk konsumsi. Orang yang memiliki pendapatan lebih besar dan kebutuhan konsumsi yang sedikit akan memiliki kesempatan untuk menghemat uang.

Menurut Desiyanti (2017), investasi dalam arti luas adalah pengorbanan atas beberapa sumber daya pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan sejumlah kompensasi atau keuntungan dimasa datang. Tabungan di bank merupakan investasi bagi seseorang. Seseorang yang memperoleh pendapatan tidak akan menghabiskan semua uang untuk konsumsi. Sebagian uang disimpan di bank. Contoh investasi yaitu tabungan, deposito, bangunan, emas, reksa dana, dan sekuritas seperti saham, obligasi, dan lain-lain.

Istilah investasi terkait dengan banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan utama

adalah mempersiapkan dan berencana untuk berinvestasi sedini mungkin untuk masa depan. Adanya perencanaan investasi untuk masa depan diperlukan. Ada enam faktor pilihan penghematan untuk dipertimbangkan (Yushita

2017), yaitu: tingkat pengembalian (persentase kenaikan tabungan), pertimbangan pajak inflasi, keamanan dan likuiditas, dan biaya, manajemen risiko.

Selain dari investasi hal yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat risiko investasi. Respon dari masing-masing individu bervariasi terhadap risiko, tergantung pada pengalaman masa lalu dan motivasi psikologis. Kebanyakan individu cenderung menghindari situasi yang menimbulkan ketidakamanan. Oleh karena itu, penting untuk dapat menghadapi risiko dengan cara baik. Risiko merupakan ketidakpastian pada tujuan. Manajemen risiko dapat dianggap sebagai kegiatan identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko ditindak lanjuti dengan tindakan koordinasi dan penggunaan secara ekonomis sumber daya untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan dampak dari peristiwa yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Proses manajemen risiko meliputi tiga langkah berikut:

1. Identifikasi risiko yang kita hadapi

2. Mengidentifikasi dampak keuangan dari risiko yang dihadapi

3. Memilih cara yang paling tepat untuk menangani risiko.

**B. Inklusi Keuangan**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Nomor](https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat/SAL%20-%20POJK%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20-.pdf)

[76/POJK.07/2016,](https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat/SAL%20-%20POJK%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20-.pdf) inklusi keuangan adalah ketersediaan

akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Inklusi keuangan bisa dikatakan terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diharapkan tentu aja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.

Efek positif dari inklusi keuangan tersebut dirasakan banyak orang, jika layanan keuangan yang tersedia menjangkau masyarakat luas termasuk UMKM. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang dengan mudah mengakses layanan keuangan, semakin cepat ekonomi bertumbuh.Tercapa[inya inklusi keuangan](https://lifepal.co.id/media/ojk-ungkap-sebagian-besar-orang-indonesia-punya-produk-keuangan/) memiliki beberapa tujuan, tujuan-tujuan tersebut di antaranya:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

2. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat;

3. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan

4. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

**C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

**1. Definisi UMKM.**

UMKM didefinisikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada masing-masing negara dan aspek lainnya. Oleh karena itu, penting untuk ulasan khusus tentang definisi tersebut sehingga dapat makna yang tepat dari UMKM, tentang makna yang sesuai dengan keberlanjutan ekonomi. Di Indonesia, ada berbagai macam definisi dari UKM berdasarkan definisi institusi tersebut. Definisi yang dibuat oleh lembaga yang berbeda seperti

a) Departemen Koperasi dan usaha kecil-menengah (UU No. 9 tahun 1995), mendefinisikan UKM adalah usaha kecil, termasuk perusahaan mikro, badan usaha dengan aset yang paling bersih sebesar Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan dengan penjualan tahunan sebesar Rp 1.000.000.000, paling banyak. Sementara itu, usaha menengah adalah badan usaha oleh warga negara Indonesia yang memiliki aset bersih antara Rp 200.000.000 sampai Rp

10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

b) Biro Pusat Statistik Nasional (BPS), BPS menetapkan usaha kecil menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah perusahaan dengan total tenaga kerja dari 5 sampai 19, sementara bisnis berukuran sedang adalah entitas bisnis dengan 20 - 99.

Tabel 1. Kriteria UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Deskripsi | Asset and perputaran (Rp) |
| 1 | Mikro | (Asset) Maksimum 50.000.000 dan  (perputaran) Maximum 300.000.000 |
| 2 | Kecil | (Asset) > 50.000.000 – 500.000.000 dan  (perputaran > 300.000.000 –  2.500.000.000 |
| 3 | Ukuran  menengah | (Asset) > 500.000.000 -  10.000.000.000 dan (perputaran) >  2.500.000.000 -50.000.000.000 |

Sumber: Menteri Koperasi dan UMKM

Ada definisi yang berbeda dari perusahaan kecil-menengah sebagai karakteristik perusahaan di setiap negara mungkin berbeda. Definisi dan kriteria perusahaan kecil-menengah didasarkan pada aspek berikut: jumlah pekerja, piutang, jumlah aset. Kriteria UMKM di negara atau lembaga asing adalah:

1) Bank Dunia, membagi usaha kecil-menengah menjadi 3 jenis, yaitu: perusahaan menengah, kriteria: jumlah maksimum karyawan 300 orang, piutang setahun hingga sejumlah $15.000.000, jumlah aset sampai dengan jumlah $15.000.000. Usaha kecil, kriteria: jumlah karyawan kurang dari

30 orang, piutang setahun tidak melebihi

$3.000.000, total aset tidak melebihi $3.000.000. usaha mikro, dengan kriteria: jumlah karyawan kurang dari 10 orang, piutang per tahun tidak boleh

lebih dari $100.000, dan jumlah aset tidak melebihi

$100.000.

2) Menurut negara Singapura, usaha kecil menengah mendefinisikan sebagai bisnis sekurang-kurangnya

30% pemegang saham lokal, dan juga aset produktif, tetap berada di bawah SG $15.000.000 (sebanding dengan US $8.700.000). Jumlah karyawan minimal 200 orang.

3) Malaysia menetapkan definisi usaha kecil menengah sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (pekerja penuh waktu kurang dari 75 orang atau pemegang saham modal kurang dari $2.500.000. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu: a) industri kecil, jumlah karyawan dengan kriteria 5-50 orang atau jumlah Modal saham sampai beberapa M $500.000. Industri medium, dengan kriteria beberapa karyawan 50 – 75 orang atau jumlah Modal saham hingga sejumlah $500.000 M – M $2.500.000.

4) Jepang, membagi usaha kecil menengah sebagai berikut: a) pertambangan dan manufaktur, dengan maksimum 300 karyawan jumlah kriteria atau jumlah Modal saham sampai beberapa US

$2.500.000. b) grosir, dengan jumlah maksimum karyawan 100 kriteria atau jumlah Modal saham ke US $840.000. c) eceran, dengan kriteria nomor karyawan maksimum 54 orang atau jumlah Modal saham US $820.000. d) Layanan, dengan jumlah maksimum karyawan 100 kriteria atau jumlah Modal saham untuk $420.000 US.

5) Korea Selatan, didefinisikan sebagai beberapa usaha kecil menengah di bawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari US $60.000.000.

6) Komisi Eropa membagi usaha kecil-menengah menjadi 3 jenis, yaitu: 1) bisnis berukuran sedang, kriteria: jumlah karyawan kurang dari 250 orang, piutang setahun tidak melebihi $50.000.000, total aset tidak boleh lebih $50.000.000. 2) perusahaan berukuran kecil, kriteria: jumlah karyawan kurang dari 50 orang, piutang setahun tidak melebihi

$10.000.000. Jumlah aset tidak melebihi

$13.000.000. 3) mikro-ukuran perusahaan, dengan kriteria: jumlah karyawan kurang dari 10 orang, piutang setahun tidak melebihi $2.000.000, jumlah aset tidak boleh lebih $2.000.000.

Sektor UKM memiliki karakteristiknya yang dapat membedakan antara usaha kecil menengah dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan perusahaan kecil-menengah ini dengan usaha berskala besar adalah dalam hal modal dan sumber daya manusia. Usaha mikro kecil dan menengah umumnya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil daripada bisnis berskala besar. Oleh karena itu, usaha kecil menengah terlibat dengan sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. Usaha kecil menengah dapat diklasifikasikan menjadi empat (4) kelompok, yaitu:

1) Kegiatan untuk membiayai kehidupan, usaha kecil menengah digunakan sebagai kesempatan untuk

bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini dikenal sebagai sektor informal.

2) Mikro enterprise adalah usaha kecil-menengah

yang bekerja sebagai pengrajin memiliki sifat kewirausahaan padanya.

3) Sebuah perusahaan kecil yang dinamis adalah UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4) Perusahaan yang bergerak cepat adalah UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi bisnis besar.

Karakteristik dari UMKM juga dapat dilihat dari bahan baku yang mudah didapat, menggunakan teknologi sederhana yang mudah dilakukan, ketrampilan dasar yang umumnya sudah dimiliki turun-temurun, tenaga kerja-intensif atau menyerap tenaga kerja cukup banyak. Contoh peluang pasar, sebagian besar produknya diserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup potensi lain untuk diekspor. Beberapa komoditas tertentu memiliki karakteristik yang terkait dengan karya seni dan budaya daerah setempat, melibatkan ekonomi masyarakat lokal yang lemah secara ekonomi menguntungkan.

**2. Peran Dan Fungsi UMKM.**

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, mempunyai produktivitas langsung dan daya saing adalah tujuan dan peran usaha kecil menengah dalam membina kewirausahaan tangguh.

Umumnya, usaha kecil menengah memiliki fungsi sebagai kegiatan ekonomi terkemuka, pemasok lapangan kerja, bisnis yang penting mengembangkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan menjadi sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi dan moneter, namun UMKM tidak bangkrut. UMKM tidak bangkrut karena kemampuan UMKM untuk berkompetisi di Indonesia cukup baik. UMKM memperkuat perekonomian Indonesia. Terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Setelah krisis ekonomi, UMKM di Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan perekonomian nasional. UMKM dapat bertahan dibandingkan dengan bisnis besar lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya UMKM yang meningkat setiap tahunnya. Pengembangan UMKM oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktanya tidak setiap bagian (pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya) memiliki cukup tanggung jawab. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi upaya kesejahteraan masyarakat. Adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perbedaan tingkat literasi keuangan serta respon terhadap akses finansial. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan

keuangan mikro untuk menjadi efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh.

**3. Peran UMKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi.**

Dilihat dari perkembangan ekonomi Indonesia, UMKM selalu dideskripsikan sebagai sektor penting dalam perekonomian. UMKM merupakan sektor penting dan tulang punggung perekonomian Indonesia. Ketika krisis ekonomi terjadi, banyak perusahaan runtuh sementara UMKM berdiri tegak. UMKM termasuk dalam kategori bisnis yang tangguh.

Lebih lanjut, mayoritas penduduk memiliki kegiatan usaha kecil namun berpendidikan rendah. Mayoritas penduduk yang memiliki kegiatan usaha kecil kurang mempunyai pendidikan yang tinggi. Sementara itu UMKM bergeser dari sektor tradisional ke modern. UMKM biasa bergerak dari sektor tradisional hingga modern. Sebagian besar usaha UMKM masih dilakukan secara tradisional dan manual. Dengan perkembangan jaman, UMKM memiliki usaha untuk beralih ke modern dengan menggunakan teknologi canggih.

Peran usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari fungsinya sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. UMKM juga merupakan kegiatan penyedia tenaga kerja terbesar. UMKM merupakan pemain penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Pencipta dan inovator pasar baru. Kontribusi untuk menjaga

keseimbangan pembayaran juga dilakukan melalui kegiatan ekspor.

Peran usaha mikro, kecil dan menengah sangat

penting dan strategis bagi perekonomian nasional. UMKM saangat penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan diharapkan dapat menyelaraskan dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Juga, mempercepat perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat pria miskin, sektor riil, dan meningkatkan distribusi merata pendapatan dalam masyarakat.

Pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan usaha kewirausahaan baru-baru ini dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki tingkat produktivitas, teknologi, dan pengetahuan. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan investasi yang memadai. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif sulit untuk menarik sejumlah besar investasi. Investasi perlu diarahkan pada pengembangan usaha kewirausahaan UKM. Pemberdayaan UKM mengharapkan lebih banyak kemampuan pertumbuhan ekonomi tinggi nasional dan periode yang relatif singkat serta dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih besar. Hal ini mampu menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan UKM dapat meningkatkan stabilitas makroekonomi, dengan menggunakan bahan baku

lokal dan potensi untuk diekspor. Hal ini akan membantu menstabilkan nilai tukar Rupiah dan menurunkan laju inflasi. Pemberdayaan usaha kecil menengah ada pada sektor riil. Pemberdayaan usaha kecil menengah juga akan memberikan perluasan lapangan pekerjaan. (Departemen Koperasi dan UKM,

2017).

UMKM memiliki peranan penting dalam masyarakat ekonomi Indonesia. Ada tiga peran penting UMKM dalam kehidupan masyarakat kecil. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengangkat kehidupan masyarakat keluar dari kesenjangan kemiskinan. Data Kementerian Koperasi dan UKM di

2011 menyebutkan bahwa UMKM dapat menyerap sekitar 101.700.000 orang, meningkatkan 57.800.000 unit UMKM, dengan total tenaga kerja 114.000.000 orang. Yang kedua adalah bagaimana menyelaraskan ekonomi. UKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan. Keberadaan UKM di Indonesia mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin dan yang kaya. Yang ketiga adalah memberikan pendapatan valuta asing bagi negara.

**D. Kendala UMKM Dan Solusi**

Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut pembiayaan usaha atau modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. UMKM mempunyai kendala modal usaha. Salah satu masalah di bidang keuangan

adalah masalah akses pembiayaan, tata kelola manajemen keuangan. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber- sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM yang hanya mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup akrab kita dengar dengan UMKM adalah harus adanya agunan atau jaminan jika menggunakan pembiayaan oleh bank. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk investasi UMKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

Lembaga keuangan bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut

menyajikan proposal usaha yang *feasible* atau layak yang *profitable*. Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus bankable dan dapat memenuhi ketentuan bank. Inilah persoalannya. Akibat bank berlaku prudent atau berhati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses bank akan mencari jalan pintas. Salah satunya adalah fintech. Sebelumnya, Undang-Undang (UU) untuk UMKM yang disahkan, belum cukup untuk menjawab persoalan yang ada dalam UKM selama ini. Pendanaan/pembiayaan menjadi masalah klasik dalam UMKM, bagaimana UMKM mendapat dana dengan mudah. Kejelasan agunan dan bentuk jaminan yang menjadi persoalan.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terhadap kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan. Sesungguhnya pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, terutama lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UKM. Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyediakan kredit investasi dan modal kerja permanen, dengan masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi. Setelah deregulasi perbankan pada 1988, kredit UMKM dengan bunga bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial. Selain itu, donor internasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang rupiah. Antara 1990 dan 2000, Bank Indonesia mendanai berbagai kredit program dengan

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan Mikro yang disalurkan melalui koperasi dan bank perkreditan rakyat. Selain itu, NPWP sebagai prasyarat pengajuan kredit di Perbankan juga telah dihapuskan, dimana hal ini memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi kita untuk mengakses modal dari sisi perbankan.

Selain peran dari Pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian, juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Bantuan Permodalan dari pemerintah juga diperlukan. Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam

pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih hebat dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

**E. Kondisi UMKM Dimasa Pandemi Covid-19**

Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UMKM. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang.

Wabah virus corona baru atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) makin terasa menakutkan dalam kehidupan dan perekonomian dalam negeri, terutama dari sisi dan usaha rakyat Usaha Mikro Kecil (UMK). Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Covid-19 menimbulkan ancaman kehilangan pendapatan rumah tangga, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk korporasi, pelemahan perekonomian akibat virus corona membuat aktifitas sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi seperti restoran dan perhotelan merupakan yang paling rentan. Sehingga, terjadi gangguan aktifitas bisnis yang akan menurunkan kinerja, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan.

Kini dihadapan covid-19 UMKM menjadi tidak berdaya. Transaksi yang menurun secara tiba-tiba sejak covid-19 ada dari sekitar Januari 2020. Penjualan dan pendapatan menurun drastis, biaya operasional dan biaya lain-lainnya yang harus tetap dikeluarkan. Biaya tersebut lebih besar dibanding profit yang diperoleh saat ini. Gaji karyawan yang harus tetap dibayar, sewa kedai, biaya listrik, air, telp/internet dan lain-lain mau tak mau harus dikeluarkan, sementara transaksi usaha hanya sedikit saja.

Biaya-biaya tetap yang harus dikeluarkan seperti gaji karyawan, sewa kedai, PDAM, listrik, telkom tidak mampu lagi ditutupi dengan pendapatan yang dihitung perbulan. Sehingga untuk mengurangi biaya tersebut mereka terpaksa mengurangi beberapa karyawan untuk sementara dan memblokir untuk sementara langganan

dengan telkom karena tidak punya uang untuk membayar. Pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya- biaya. Pendapatan usaha UMKM hancur gara-gara wabah Covid-19, sehingga mereka kesulitan untuk membayar pengeluaran rutin.

Seorang pelaku bisnis merasakan bahwa selama ini usaha mereka berjalan dengan baik. Keuntungan yang didapat dari usaha walau tidak besar tapi mampu menghidupi keluarga mereka. Sumber dana usaha mereka adalah kebanyakan dari modal sendiri. Namun terkadang juga menggunakan hutang sebagai sumber dananya.

Keuntungan yang mereka peroleh bisa dikatakan minus. Sudah terjadi keadaan dimana biaya lebih besar dari profit. Lalu mengapa mereka tidak tutup usaha mereka? Sangat miris memang, kalau mereka tutup, asap didapur tidak akan mengebul, dan mereka tidak mempunyai penghasilan. UMKM berharap dan berdoa setiap hari agar ada orang yang berbelanja dikedai mereka. Belum lagi hutang usaha yang lumayan banyak yang harus segera dibayar. Saat ini bank mau memberikan sedikit kelonggaran untuk membayar cicilan setengahnya selama enam bulan ini.

UMKM paham bahwa pandemi global membuat ekonomi rakyat menjadi susah. Dengan adanya pendemi covid-19 daya beli masyarakat menurun. Terlebih bagi masyarakat miskin dan rentan ekonominya. Selanjutnya langkah untuk tetap meningkatkan daya beli masyarakat juga perlu segera direspon dengan cepat. Kegiatan tersebut misalnya pembagian sembako, apakah misalnya bantuan langsung tunai. Terkait dengan adanya insentif ekonomi

bagi pelaku usaha dan UMK sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK atau pengurangan tenaga kerja.

Kondisi keuangan UMK juga harus dapat perhatian pemerintah dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Usaha mikro kecil seyogyanya diberi bantuan keuangan. Apakah berupa bantuan tunai atau kredit tanpa bunga. Bantuan suntikan dana dlm bentuk apapun amatlah penting bagi UMK. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial sektor informal dan stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19.

Pilihan solusi untuk UMKM lainnya juga diharapkan nantinya dapat berupa permodalan hingga pemasaran. Penggunaan teknologi bisa jadi salah satu pemecahan dalam kondisi yang sekarang ini. Termasuk pemerintah melaksanakannya secara terukur, sistematis, semuanya masuk akal. Selain itu, pemerintah mempercepat pencairan dana bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II sebesar Rp7 triliun bulan ini. Harapannya, stimulus ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan menekan persoalan ekonomi di tengah pengendalian Covid-19.

**F. Literasi Keuangan UMKM**

Literasi keuangan adalah penting bagi UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan seorang UMKM terhadap usahanya, seperti pengetahuan dalam bidang keuangan. Sangat penting memperkaya pengetahuan pelaku UMKM

terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik menjadi usaha yang lebih besar. Kemampuan UMKM dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan dan kinerja usaha UMKM.

Kemampuan mengelola keuangan UMKM sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan keberlangsungan usaha. Tanpa adanya pemahaman UMKM tentang konsep- konsep dasar keuangan, akan menyulitkan UMKM. UMKM tidak bisa mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan. UMKM yang memiliki dasar pengetahuan keuangan yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih baik hal seperti pinjaman, investasi dan kegiatan keuangan lainnya. Jika UMKM yang tidak memiliki dasar pengetahuan keuangan akan memungkinkan timbulnya resiko dalam usahanya seperti kerugian bahkan kebangkrutan.

Program literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. OJK menggunakan indikator literasi keuangan sebagai berikut: kepemilikan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan; memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Selanjutnya

tingkat literasi keuangan diklasifikasikan menjadi empat jenjang. Pengukuran literasi keuangan dan pelaksanaan edukasi keuangan bertujuan mewujudkan masyarkat Indonesia yang well literate. Sebagai instrument pengukur tingkat literasi keuangan, OJK menggunakan tiga indikator yakni 1. Pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk jasa keuangan, 2. Pengetahuan dan keyakinan terhadap fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, 3. Keterampilan menggunakan produk dan jasa keuangan.

Selain pemerintah mempunyai program literasi keuangan untuk masyarakat, pemerintah juga berperan dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada UMKM terkait literasi keuangan. Pemerintah harus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM agar terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan-perusahaan dengan UMKM.

**G. Inklusi Keuangan UMKM Pada Pandemi Covid-19.**

Hambatan bagi pengembangan UMKM karena memiliki modal yang terbatas. Modal adalah sumber ekonomi nilai manusia dan barang. Modal dapat digunakan oleh sektor produksi. Modal perusahaan terdiri dari ekuitas dan hutang salah satu bentuk modal bentuk usaha kredit. Kredit adalah tersedianya uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Peminjam melunasi hutangnya beserta pembayaran bunga pada periode tertentu.

Modal merupakan faktor penting yang diperlukan untuk memperluas unit usaha. Modal UMKM termasuk

terbatas. Pada saat ini belum semua UMKM bisa berhutang modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya. UMKM sulit mendapatkan pembiayaan dari bank. Sulitnya mendapatkan hutang karena kurangnya persyaratan teknis dan administrasi. Persyaratan untuk menjadi kendala terbesar bagi usaha kecil menengah.

UMKM rata-rata mempunyai modal yang sedikit. UMKM termasuk sektor informal. Sektor informal memiliki karakteristik, yaitu: kegiatan bisnis umumnya sederhana; skala bisnis biasanya relatif kecil; umumnya bisnis sektor informal tidak memiliki izin usaha; sektor informal kerja yang mudah dan tidak ada keterampilan khusus dibandingkan dari sektor formal; pendapatan rendah; hubungan kecil antara sektor informal dengan institusi lain; masih menggunakan alat tradisional; diversifikasi sektor bisnis; sejumlah besar kesulitan operasi sektor informal untuk mendapatkan kredit dari bank. Tingkat perbankan kredit memiliki tingkat risiko yang tinggi. UMKM sering menghadapi kesulitan mendapatkan kredit dalam mengembangkan bisnis mereka.

**H. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan UMKM Dalam**

**Literasi Dan Inklusi Keuangan**

**1. Aliran Kas Masuk**

UMKM harus memahami pentingnya aliran kas masuk pada usahanya. Saat ini transaksi menurun secara tiba-tiba sejak covid-19 yang ada sekitar bulan Januari 2020. Penjualan dan pendapatan menurun drastis, biaya operasional dan biaya lain-lainnya yang harus tetap dikeluarkan. Biaya lebih besar dibanding

profit yang diperoleh saat ini. Gaji karyawan yang harus tetap dibayar, sewa kedai, biaya listrik, air, telp/internet dan lain-lain mau tak mau harus dikeluarkan, sementara transaksi usaha hanya sedikit saja. Semua pelaku bisnis pasti paham betapa pentingnya punya arus pemasukan uang yang tidak menurun. Salah satu tantangan terbesar khususnya bagi bisnis UMKM di masa pandemi seperti ini adalah menurun secara drastisnya pemasukan. Pasalnya, di saat seperti ini aktivitas masyarakat sangat berkurang karena hanya di rumah saja.

Oleh karena itu, analisis yang cermat terhadap pemasukan bisnis sangat dibutuhkan. Dengan mencatat dan menganalisis pemasukan harian, mingguan dan bulanan dimasa pandemi covid ini UMKM bisa menganalisis tren, pola pemasukan serta memperkirakan kondisi usaha. UMKM harus cermat mencatat setiap aliran kas masuk dari penjualannya. Walaupun pada situasi seperti sekarang ini membuat prediksi bisnis jadi lebih sulit, mencatat dan meninjau pemasukan usaha setiap harinya secara akurat menjadi kian penting. Tidak hanya untuk melihat keadaan bisnis saja, pemasukan usaha juga digunakan oleh pemberi pinjaman sebagai patokan untuk membayar hutang kembali.

**2. Aliran kas keluar**

Selain aliran kas masuk hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah aliran kas keluar. Dengan meninjau pengeluaran, UMKM bisa tahu biaya biaya yang harus dikeluarkan dalam

menjalankan usahanya. Dengan mengetahui besarnya pengeluaran UMKM bisa menekan atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Biaya-biaya tetap yang harus dikeluarkan seperti gaji karyawan, sewa kedai, PDAM, listrik, telkom apakah masih bisa mampu ditutupi dengan pendapatan/aliran kas masuk yang dihitung perbulan. Sehingga untuk mengurangi biaya tersebut UMKM terpaksa mengurangi beberapa karyawan untuk sementara dan berhenti berlangganan sementara dengan telkom, mengurangi/hemat pemakaian listrik dan lain sebagainya.

Kalau usaha UMKM adalah industri kecil maka beberapa pengeluaran yang berhubungan dengan biaya produksi bisa dikurangi sementara. Beberapa pengeluaran perlu diketatkan untuk menjaga kestabilan usaha. Saat menghadapi situasi seperti ini harus difikirkan pengeluaran mana yang harus wajib dilakukan. Beberapa pengeluaran yang bisa diminimalkan harus dikurangi. Saat ini UMKM sebaiknya mengelola pengeluaran sedemikian rupa untuk melindungi arus kas usaha. Mengelola pengeluaran kas dan kas masuk dalam keaadaan seperti ini menjadi sangat penting. Jangan lupa menghitung aliran kas keluar dengan aliran kas masuk setiap hari. Jika aliran kas masuk lebih besar dari pada aliran kas keluar/pengeluaran maka didapatlah laba oleh UMKM. Sebaliknya jika aliran kas masuk lebih kecil dari aliran kas keluar atau pengeluaran lebih besar dibanding uang masuk maka UMKM akan menderita kerugian.

Seperti yang sudah disebutkan, salah satu cara untuk mengelola keuangan bisnis adalah dengan menekan biaya pengeluaran. Untungnya saat ini sudah semakin banyak vendor bisnis yang menawarkan biaya yang terjangkau, misalnya jasa website toko online murah dan jasa-jasa lainnya.

**3. Mengelola Piutang**

Selain aliran kas masuk dan aliran kas keluar UMKM perlu mengelola piutang usahanya. Piutang adalah hak milik UMKM yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Piutang bisa saja berbentuk pinjaman yang UMKM berikan pada orang lain, tagihan yang belum dibayar sementara produk sudah diberikan, atau pendapatan yang belum diterima. Kebijakan pengelolaan piutang yang baik bagi UMKM menyangkut: standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang, evaluasi terhadap pelanggan dan mengumpulkan dan menganalisis informasi.

a. Standar kredit

Standar kredit merupakan kriteria bagi usaha UMKM untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Supaya keuangan UMKM sehat maka UMKM tidak boleh sembarangan memberikan hutang kepada pelanggannya. UMKM harus menyeleksi konsumennya untuk diberikan kredit. UMKM harus mengetahui siapa yang diberi hutang. Piutang juga menyangkut kebiasaan

pelanggan membayar kembali, kemungkinan langganan tidak membayarkan kredit dan jangka waktu pembayaran. Sangat banyak terjadi UMKM kesulitan untuk menagih piutang kepada pelanggannya. Akibatnya UMKM akan kesulitan uang tunai karena dananya berhenti berputar pada konsumen yang terlambat atau tidak membayar hutangnya.

Konsumen yang terlambatnya membayar piutang akan mengganggu sistem keuangan UMKM secara keseluruhan. Semakin lama waktu pengumpulan piutang semakin besar investasi pada piutang dan biaya yang timbul juga semakin besar. Ada pula kemungkinan piutang tak tertagih atau konsumen tidak membayar hutangnya dengan berbagai alasan. Supaya pengelolaan piutang berjalan dengan lancar maka UMKM harus memperhatikan elemen-elemen kebijakan kreditnya yaitu periode kredit jangka waktu pelunasan. Jika waktu pelunasan lebih pendek, ini akan mengurangi lamanya hari pengumpulan piutang dan rata-rata piutang, tapi mungkin akan menurunkan penjualan. Disinilah perlunya UMKM mengelola piutangnya dengan baik. Potongan tunai yang diberikan juga memperendah harga jual sehingga menarik pelanggan baru untuk membeli pada UMKM dan mengurangi lamanya hari pengumpulan piutang atau lebih singkatnya waktu piutang.

Pengelolaan piutang lainnya adalah penetapan standar kredit. Standar kredit yang ketat cenderung mengurangi penjualan, karena penjualan dilakukan secara tunai. Namun sebaliknya standar kredit yang ketat juga akan mengurangi biaya piutang tak tertagih. Sedikitnya piutang tak tertagih akan akan membuat keuangan UMKM menjadi stabil. Selanjutnya kebijakan penagihan piutang juga harus diperhatikan oleh UMKM. Kebijakan penagihan piutang yang kuat disatu sisi akan mengurangi lamanya hari pengumpulan piutang tapi mungkin merusak hubungan dengan pelanggan. Apalagi kalau penagihannya dilakukan dengan cara mendesak pelanggan, menelpon tiap sebentar, mendatangi yang bersangkutan secara terus menerus, mendatangkan debt collector dan sebagainya sehingga membuat konsumennya jera untuk berhutang kembali. Hal ini akan menyebabkan turunya tingkat penjualan UMKM.

b. Persyaratan Kredit

Merupakan kondisi yang disyaratkan UMKM untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan meliputi: lama waktu pemberian kredit/pelonggaran kredit dan pemberian potongan tunai. Sebaiknya UMKM tidak memberikan piutang yang tidak terlalu lama mengingat dana UMKM yang tertahan, tidak bisa diperputarkan kembali menjadi modal. Kalau pelanggan lama membayar maka salah satu cara agar piutang dapat dikumpulkan kembali yaitu dengan memberikan

potongan tunai. Misalnya 2/10, n 30 artinya piutang harus dibayar dalam waktu jangka 30 hari, namun jika pelanggan membayar piutang dalam jangka sepuluh hari atau kurang maka pelanggan akan mendapatkan potongan 2%.

c. Kebijakan Kredit Dan Pengumpulan Piutang

Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup keputusan tentang periode kredit yang diberikan, potongan tunai yang diberikan dan adanya pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Usaha pengumpulan piutang dapat dilakukan dengan cara pengiriman surat, telp, melalui agen, atau penundaan pengiriman sampai pembayaran piutang. Pelanggan yang belum lunas piutangnya sebaiknya tidak diberi barang sampai piutang lunas dulu. Usaha pengumpulan piutang agresif harus dihindari, jangan sampai pelanggan lari ke pesaing lain. Adanya risiko kalau kebijakan kredit ketat adalah dapat menurunkan penjualan. Sebagian pelanggan mungkin memilih mencari perusahaan lain kalau perusahaan terlalu menekan untuk membayar cepat. Apalagi adanya pengumpulan piutang yang agresif.

d. Evaluasi Terhadap Pelanggan

Sebelum memberikan piutang sebaiknya UMKM melakukan evaluasi dulu terhadap calon pelanggan. Caranya adalah dengan mengumpulkan informasi yang relevan tentang calon pelanggan. Mengumpulkan dan menganalisis informasi pelanggan adalah melalui laporan keuangan

pelanggan, bank dan sumber lain seperti pusat data dan studi industri. Selanjutnya UMKM memberikan syarat piutang kepada pelanggan yaitu syarat 6 *Cs of credit* credit yaitu: *character*, *capacity*, *capital, collateral, condition of economy, constraint*. Syarat piutang kepada pelanggan yaitu:

1. *Character*, mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pelanggan dalam memenuhi kewajiban kewajiban/hutang finansialnya. Adapun beberapa petunjuk untuk mengetahui karakter adalah:

a) Mengenal pelanggan dari dekat.

b) Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur/pelanggan.

c) Mengumpulkan keterangan dan meminta

pendapat dari rekan-rekannya, pegawai dan pesaing mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain.

2. *Capacity*, menerangkan tentang kemampuan pelanggan dalam mengelola usahanya yaitu dengan cara:

a) Hasil produksi yang meningkat. b) Penjualan yang tinggi.

c) Adanya laba.

3. *Capital*, menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio keuangan likuiditas, *solvabilitas*, *profitabilitas*, manajemen aset dan nilai perusahaan dari pelanggan. Keterangannya adalah sebagai berikut:

a) Likuiditas adalah kemampuan perusahaan/bisnis/usaha membayar hutang jangka pendek.

b) *Solvabilitas* adalah kemampuan perusahaan/bisnis/usaha membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang (total hutang).

c) *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan/bisnis/usaha untuk menghasilkan laba.

d) Manajemen aset adalah kemampuan perusahaan/bisnis/usaha untuk mengelola aset-asetnya.

e) Nilai perusahaan menunjukan nilai/harga perusahaan.

4. *Collateral*, *collateral* berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan digunakan sebagai jaminan.

5. *Conditions of economy*, Melihat kondisi ekonomi secara umum dimana keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam/ orang yang berpiutang, kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya, keadaan pemasaran pelanggan, prospek usaha di masa yang akan datang, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya.

6. *Constraint*, *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Mengevaluasi calon pelanggan berikutnya adalah menganalisis kondisi calon atas dasar informasi yang diperolehnya. Mengambil keputusan apakah calon langganan akan diberikan kredit atau tidak dan berapa jumlahnya. Analisis pemberian kredit memperhatikan kendala waktu

dan biaya

Satu hal yang sangat penting, apabila UMKM menawarkan pilihan pembayaran melalui kredit atau cicilan, yang perlu jadi perhatian apakah mereka secara konsisten membayar tepat waktu atau tidak. Apakah mereka menunda pembayaran atau tidak. Jika UMKM menagih piutang pada pelanggan mengalami kendala/tidak lancar akan berakibat buruk terhadap kestabilan usahanya.

**4. Mengelola Hutang**

Hutang UMKM biasanya berupa hutang dagang. Hutang dagang yang dilakukan oleh UMKM sebaiknya bersifat produktif bukan konsumtif. Hutang produktif artinya hutang tersebut digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Contoh hutang dagang misalnya menambah modal dagang usaha, menambah investasi atau pendanaan usaha. UMKM melakukan pinjaman/hutang pada usahanya dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya

pertimbangan yang penting adalah menghitung biaya pinjaman dan tingkat keuntungan yang didapat.

Terdapat berbagai jenis hutang yang ada dalam

menjalankan bisnis, mulai dari hutang modal, hutang dagang, dan lain sebagainya. Namun secara garis besar, hutang dibedakan ke dalam dua jenis sesuai dengan jangka waktu pembayarannya. Berikut adalah dua jenis utang yang perlu untuk kita ketahui:

a. Hutang Lancar,

Hutang lancar merupakan semua jenis hutang yang memiliki jangka waktu pembayaran cukup pendek, biasanya berada dalam kurun waktu satu tahun. Hutang lancar biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional yang bersifat rutin atau untuk investasi jangka pendek. Contohnya hutang dagang gaji karyawan dan lain sebagainya.

b. Hutang Tidak Lancar

Kebalikan dari hutang lancar, hutang tidak lancar merupakan kewajiban jangka panjang yang memiliki jatuh tempo pembayaran hingga lebih dari sepuluh tahun. Biasanya hutang tidak panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan yang berskala lebih besar, seperti perluasan usaha, membeli gedung baru, atau pembelian mesin produksi. Beberapa utang yang termasuk ke dalam jenis utang tidak lancar adalah obligasi dan utang hipotik.

UMKM harus memperhatikan tenggat hutang. Apabila vendor menawarkan diskon pada UMKM maka lakukanlah pembayaran yang lebih awal, ambil kesempatan untuk mengambil diskon tersebut. Bayar lebih awal maka akan ada potongan pembayaran. Ini juga bisa menjadi alternatif untuk melakukan negosiasi dengan vendor yang tidak mau memberikan perpanjangan waktu. Mungkin vendor bisa menawarkan diskon untuk pembayaran lebih awal, misalnya 10 hari sebelum tenggat hutang jatuh tempo.

Keempat poin yang ditulis (aliran kas masuk, aliran kas keluar, piutang dan hutang) harus ada dalam aliran laporan kas UMKM. Dengan memahami tiap- tiap aspek dan hubungannya dengan satu sama lain, UMKM dapat menganalisis dan memperkirakan keuangan. Mengetahui seberapa besar dampak covid-

19 terhadap usaha UMKM dan menyusun strategi keuangan untuk bertahan dan berkembang.

**BAB II Peluang UMKM Dengan Menggunakan Inklusi**

**FINTECH Dimasa Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 yang mulai menyeruak sejak beberapa bulan yang lalu, hingga saat ini belum juga berakhir. Pandemi covid-19 telah mendistorsi kehidupan masyarakat terutama dibidang ekonomi. Pandemi covid-19 telah membuat jatuhnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, turunnya daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan penjualan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurun tajam hingga yang tersisa hanya 10-20 % saja.

Kondisi ini membuat UMKM jatuh telak. Kondisi penurunan ekonomi dialami oleh semua UMKM. Saatnya sekarang UMKM bangkit dan tidak berdiam diri. UMKM harus tetap produktif, lebih kreatif dan selalu berusaha. Apalagi sekarang Indonesia sudah memasuki masa new normal. Dimasa new normal UMKM tetap menjalankan usaha dengan mengikuti protol yang ada, jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan. UMKM harusnya bangkit sehingga kembali menjadi usaha rakyat yang tahan banting dalam menghadapi keadaan apapun. Menghadapi masa new normal yang belum bebas covid-19, untuk kembali meningkatkan penjualan, UMKM tidak hanya dituntut bisa berjualan secara tradisional saja, tapi juga harus mampu bertransformasi dengan mencoba bisnis online sebagai pilihan kedua setelah bisnis offline (tradisional). UMKM harus melek keuangan, harus memahami dan mengaplikasikan literasi dan inklusi keuangan dalam usahanya. UMKM harus pandai mencari sumber pendanaan. Tidak saja dari dana bank, koperasi dan pendanaan lainnya,

pembiayaan atau pendanaan perusahaan bisa didapatkan dari financial technology atau fintech.

Teknologi keuangan atau financial technology (fintech)

muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat, situasi dan kondisi yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Teknologi keuangan atau Financial technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi modern. Awalnya transaksi pembayaran harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas. Sekarang dapat melakukan transaksi pembayaran jarak jauh dalam hitungan detik saja. Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Perkembangan teknologi keuangan membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha (UMKM), maupun perekonomian nasional. Fintech bermanfaat mengubah sistem pembayaran terutama dimasyarakat dan telah membantu bisnis start-up dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi. Fintech berperan dalam sistem pembayaran yang

mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank.

Dalam hal pembayaran, fintech berperan menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan kliring, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memastikan lalu lintas pembayaran dengan menggunakan teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan internet. Dalam hal tabungan, investasi, manajemen risiko dan pinjaman serta penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku UMKM dan lainnya untuk patuh kepada peraturan makroprudensial. Adanya sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal pembayaran, penyelesaian atau settlement dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen.

Cara sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM adalah dengan menggunakan banking online yang aplikasinya bisa didownload di android. Banking online bisa digunakan sebagai transfer uang. Jadi pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai. Selain transfer uang, banking online juga bisa

melakuan pembayaran, melakukan pembelian baru, e-money dan sebagainya.

Selain fintech berfungsi sebagai alat pembayaran oleh

nasabah, fintech juga berlaku sebagai sistem pembiayaan seperti peer to peer lending. Peer to peer lending adalah praktik atau usaha untuk [m eng a jukan pi njam an a](https://koinworks.onelink.me/ty8d/1ffcc751?utm_source=blog&utm_medium=organic&utm_campaign=lender&utm_content=article)t au memb erik an pinjam an untuk keperluan individu/bisnis. Pada intinya, peer to peer lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman (pendana) dengan peminjam secara online. Peer to peer lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman a[tau me ngaj uk an pinj ama n y](https://koinworks.com/blog/pinjaman-modal-usaha/)ang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pembiayaan peer to peer lending cocok untuk UMKM yang tidak bankable.Cara meminjamnya cepat dengan tingkat bunga dibawah bunga bank.

**BAB III Perilaku Covid-19 Merubah Administrasi Di**

**Indonesia**

Di akhir tahun 2019 kita dikejutkan oleh suatu pandemic yang berasal dari China tepatnya di kota Wuhan yang dikenal dengan virus corona atau dengan nama lain yang disebut Covid-19. Diawal kehadirannya dirasakan biasa-biasa saja dan bahkan beberapa negara menganggapnya sepele dan tidak ada perlakukan atau kebijakan khusus dalam mengatasi pandemic corona tersebut namun lama kelamaan menjadi sesuatu yang menakutkan dan bahkan berita terakhir dari [https://ternate.tribunnews.com/2020/07/08/breaking-news-](https://ternate.tribunnews.com/2020/07/08/breaking-news-tambah-1853-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-68079-per-8-juli-2020) [tambah-1853-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-](https://ternate.tribunnews.com/2020/07/08/breaking-news-tambah-1853-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-68079-per-8-juli-2020)

[68079-per-8-juli-2020 te](https://ternate.tribunnews.com/2020/07/08/breaking-news-tambah-1853-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-68079-per-8-juli-2020)rdapat 68.079 terinfeksi virus corona sedangkan yang sembuh sebanyak 31.585 orang dan yang meninggal sebanyak 3.359 orang Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan maraknya kasus pandemic Covid-19 ini dengan berbagai macam kebijakan yang ditempuh terutama mengenai *sosial distance* yang telah menggubah system pendidikan Indonesian secara drastis, dimana pembelajaran yang biasanya melalui tatap muka berubah drastis menjadi melalui media yakni *video conference* hal ini dilakukan untuk membatasi kontak antara satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi penularan maupun menularkan dan sudah pastinya kebijakan ini menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam cara mengajar ataupun proses kegiatan belajar mengajar yang di lakukan antara guru dengan siswa ataupun antara mahasiswa dan dosen.

Kebijakan lain yang dilakukan adalah di rumah saja yang artinya semua aktivitas yang biasa dilakukan diluar untuk

sementara waktu tidak dilakukan di luar hal ini diharapkan dapat memutus mata rantai perkembangan dari covid-19 ini dan *Work From Home* (WFH) menjadi kalimat yang sangat popular saat ini, dimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang WFH ini sehingga merubah tatanan administrasi yang ada saat ini dan akibat virus Covid-19 ini telah merubah banyak tatanan administrasi saat ini, diantaranya:

1. Dalam dunia Pendidikan

a. Beberapa kampus mulai menerapkan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh atau kea rah online.

b. Pelaksaan Ujian Nasional (UN) untuk SMP dan SMA

ditiadakan.

c. *Physical Distancing*

d. Penutupan sekolah untuk sementara waktu dan siswa belajar di rumah.

2. Perekonomian

a. Penurunan Import bahan mentah terutama ke negara- negara pandemik dan terjadinya penurunan harga komoditas dan barang tambang.

b. Peneriman pajak sektor perdagangan mengalami penurunan.

c. Pada Investasi, dimana masyarakat akan lebih berhati-

hati saat membeli barang atau investasi.

d. Bisnis maskapai penerbangan penerbangan sepi hal ini diakibat larangan perjalanan keluar terutama daerah pandemik virus korona.

e. Pada sektor wisata f. Bisnis perhotelan

g. UMKM yang omsetnya menurun drastis.

Presdiden jokowi mengeluarkan PERPPU Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan.

1. 202 negara menghadapi pandemic Covid-19 yang mengancam keselamatan masyarakat, ekonomi dan keuangan.

2. Peraturan pemerintah penganti undang-undang (Perppu) tentang kebijkan keuangan negara dan stabilitas keuangan sebagai dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas system keuangan.

3. presiden jokowi menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-

19 sebesar Rp 405,1 triliun.

4. Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, untuk pembelian APD (Alat pelindung diri), test kit, reagen, ventilator, upgrade 132 rumah sakit termasuk wisma atlet serta juga insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan dipusat dan didaerah.

5. Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial yaitu: cash transfer untuk 10 juta PKH; 20 juta penerima kartu sembako, kartu prakerja untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK dan pekerja informal. Pembebasan tagihan listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan 450 VA, DISKON 50 % untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. dan dukungan logidik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.

6. Rp 70,1 triliun insentif dan relaksasi perpajakan bagi sektor ekonomi terdampak dan penundaan pembayaran

cicilan kredit usaha rakyat (KUR) dan Ultra Mikro. Rp 150 triliun pembiayaan dan jaminan untuk pemulihan dan restrukturisasi kredit terutama untuk UMKM.

7. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention otoritas jasa keuangan (OJK) menrbitkan keringanan dan /atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan

10 miliar termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun.

8. Defisit APBN diperkirakan meningkat 5,07% GDP, diperlukan relaksasi kebijakan deficit APBN diatas 3 % untuk 3 tahun (2020 sd2022). tahun 2023 kembali ke maksimum deficit 3 % GDP.

9. Presiden Jokowi mwngharapakn dukungan dari DPR RI untuk mendapat persetujuan PERPPU dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perkeonomian indonesia.

Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuangan demikian bunyi pasal 6 ayat a, seperti yang dikutip detikcom senin (6/4/2020), sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk sejumlah kementerian dan lembaga dipangkas dan di tinggkatkan hal ini disesuaikan dengan kondisi dari pengaruh serta dampak Covid-19, antara lain:

1. Kementerian pertahanan, semula Rp.131 triliun menjadi

121 triliun.

2. Kementerian pertanian, semula Rp 21 triliun menjadi 17 triliun.

3. Kementerian perhubungan, semula Rp. 43 Triliun menjadi

36 triliun.

4. Kemen PUPR, semula Rp. 120 triliun menjadi Rp. 95 triliun

5. Kemenristek dan Teknologi, semula Rp.42 triliun menjadi

Rp. 2 Triliun

6. Kemensos semula Rp. 62 triliun menjadi Rp. 60 triliun

7. Kejaksaan Agung semula Rp. 7 Triliun menjadi Rp. 6 triliun

8. Mahkamah Agung semula Rp.10,5 triliun menjadi Rp.

10,1 triliun.

9. Polri semula Rp.104 triliun menjadi Rp. 96 triliun

10. Mahkamah Konstitusi semula Rp.246 miliar menjadi Rp.

221 miliar.

Namun untuk beberapa kementerian mendapat kenaikan, diantaranya:

1. Kemendikbud, semula Rp. 36 triliun menjadi Rp. 70

Triliun.

2. Kementerian Kesehatan, semula Rp. 57 triliun menjadi Rp.

76 triliun

Beberapa perubahan dalam berbisnis yang semakin marak di era pandemic Covid-19 ini semakin menjadi peluang bisnis yang di jajakan melalui online dari semua bentuk bahkan makanan cepat saji semakin menjadi pilihan yang utama ketimbang harus ke pasar dulu, kemudian merebaknya bisnis penjualan masker, hand sanitizer dan berbagai produk yang berkaitan melindungi diri serbuan pandemic virus Covid-19 termasuk APD ( Alat Pelindung Diri).

Dari kebutuhan diatas menjadi peluang bisnis bagi sebagain orang yang dapat menangkap peluang di tengah virus yang semakin mewabah dan hal ini mengakibatkan semakin berjalannya per ekonomian di bidang yang home industry

terutama dibidang masker kain dan makin menjamurnya home industry dalam bidang pembuatan masker berbahan dasar kain.

Dalam dunia pendidikan saat ini semakin maraknya

menggunakan daring melalui video conference melalui zoom ataupun menggunakan *Cisco Webex meeting room* dan hal ini berakibta pada pengeluaran dana yang tidak sedikit untuk menyiapkan sarana dan aplikasi dari metode pembelajaran jarak jauh ini.

Hampir lupa pemerintah juga memberikan keringanan bagi UMKM yang kredit selama 1 tahun ke depan dan mekanisme diserahkan kepada pihan finance maupun bank pembiayaan lainnya.

Metro Bali tanggla 8 April 2020 menyatakan seluruh anggota Dewan Golkar Bali sumbangkan 75 persen gaji selama tiga bulan, bantu rakyat hadapi Covid-19.

Banyak jenazah yang terkena Covid-19 di tolak dibeberapa daerah dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala besar di DKI Jakarta ada beberapa poin dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Kegiatan belajar, bekerja dan beribadah di rumah.

2. Semua tempat hiburan, rekreasi, taman dan balai pertemuan di tutup.

3. Pembatasan kegiatan sosial budaya, seperti resepsi

pernikahan dan khitanan.

4. kegiatan perkantoran dihentikan kecuali 8 sektor: kesehatan, pangan, energy, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistic/ distribusi, retail (warung/ took) dan industry strategis.

5. Pembatasan kapasitas penumpang dan jam operasional moda transportasi.

6. Mewajibkan warga pakai masker kain selama di luar rumah.

7. Pemrov DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan

menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak PSBB akibat wabah Covid-

19.

Pemerintah Indonesia memilih pembatasan sosial berskala besar dari pada *lock down* yang dilakukan oleh beberapa negara hal ini langkah yang dilakukan sebagai interprestasi rasa takutnya pemerintah Indonesia karena ketika langkah *lockdown* yang diambil, maka berakibat besar dalam bidang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia menjadi sasaran utama yang akan dirugikan ketika bukan pembatasan sosial yang dipilih sebagai jalur dalam menangani virus corona tersebut.

Banyak hal yang berubah pada masa Covid-19 ini mulai dari tidak boleh keluar rumah ataupun mudik atau pulang kampung dan pada bulan ramadhan di tahun 2020 ini sudah banyak sekali hal yang mengalami perubahan mulai dari shalat berjama’ah baik shalat wajib maupun sunnah tarawih di sarankan tidak berjamaah di masjid, namun cukup hanya dilakukan dirumah saja, serta tidak adanya pasar ramadhan yang biasanya hanya ada pada bulan ramadhan serta berbagai kegiatan yang biasanya lazim ada menjadi tidak ada dan khususnya untuk lebaran tidak diijinkan bersilahrurahmi dengan para tetangga sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

**BAB IV Covid-19 Merubah Wajah Ramadhan Dan**

**Lebaran**

Covid-19 mengubah sejumlah wajah dan tradisi yang sudah terjadi sekitar 1500 tahun yang lalu mulai dari bulan ramadhan yang biasanya terjadi shalat taraweh dengan adanya pandemic covid hal ini tidak lagi dilakukan namun shalat taraweh dilakukan di rumah saja dengan keluarga inti dan kebiasaan yang pada bulan ramadhan yang dikenal dengan nama Bukber ( Buka bersama) hanya tinggal sebuah cerita dan kebiasaan dalam melakukan shalat malam di akhir ramadhan atau tradisi menunggu malam lailatul qadar pun hanya dilakukan di rumah saja yang seharusnya menurt Fitriyanti (2019) bahwa tradisi yang ada membuat masrakat muslim terutama menjadi berelasi sosial dan dapat memberikan manfaat yaitu menjaga kehidupan berkelompok, menciptakan rasa aman dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan bentuk nilai dasar manusia, yaitu security dab conformity. Perkembangan zaman serta pandemic covid-19 secara otomatis akan turut mempengaruhi kualitas dan pola interakasi yang terjadi dalam sosial masyarakat yang disebabkan oleh PSBB ( Pembatasan Sosial Bersekala Besar) sehingga pola interaksi yang terjadipun berubah dari yang tadinya melakukan shalat berjama’ah menjadi shalat sendiri atapun shalat berjama’ah dengan keluarga inti saja. Pandemi Covid-19 ini telah merubah sebuah tatanan dan perubahan yang secara drastis untuk banyak hal dalam proses melakukan ibadah yang sudah rutin di lakukan setiap bulan ramadhan dan menjadi berubah.

Hal yang paling ironis adalah acara puncak dari bulan ramadhan atau yang dikenal dengan hari raya idul fitri tidak lagi dilakukan dimesjid atau di lapangan namun dilakukan dirumah sajabahkan tradisi mudik dan pulang kampung bahkan hampir ditiadakan dan dilarang demi untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus covid-19.

Ramadhan di tahun 2020 ini lah yang menjadi sejarah pertama dimana shalat taraweh tidak dianjurkan di masjid melainkan di lakukan di rumah termasuk tadarusan yang biasanya dilakukan dan menjadi rutinitas pada bulan ramadhan dan termasuk shalat malam di 10 malam terakhir pada bulan ramadhan menjelang malam lailatul qadar juga di lakukan dirumah saja dan bila ingin beritikaf juga dilakukan dirumah. Bahkan ada hal yang lebih menarik lagi yang disebabkan oleh kehadiran virus covid-19 ini tradisa pasar dadakan yang biasanya dapat meningkatkan perekonomian yang disebabkan oleh menjamurnya pasar dadakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang mengakomodir masyrakat UMKM yang dapat menjual dagangannya, namun di tahun 2020 ini menjadi hal yang tidak boleh dilakukan disebabkan anjuran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk di berkerumun ataupun berkelompok untuk menghindari terjadinya penularan virus ini lebih luas lagi.

Bahkan diakhir ramadhan yang biasanya masyarakat muslim menyambut dengan suka cita dengan melakukan takbir keliling, namun di tahun 2020 ini cukup dilakukan oleh beberapa orang saja sedangkan yang lainnya dirumah saja. Pada acara puncaknya yakni Hari lebaran idul fitri 1441 ini banyak masyarakat muslim terutama melakukan shalat di rumah saja dengan khotbah yang dipimpin kepala keluarga dan

biasanya shaf dalam shalat yang rapat, namun pada masa Covid-19 ini dibiarkan agak renggan dan hal yang menjadi ritual setalah shalat Idul fitri dengan sialhturahmi dan berjabat tangan diantara tetangga dan handai taulan,pada tahun ini dtidak dilakukan demi mencegah penyebaran Virus ini semakin melebar.

Nailul Mona (2020), menyatakan bahwa virus corona merupakan pandemic yang mudah menyebar secara contagious. Virus ini dapat menyerang siapapun yang terhubung dengan pembawa virus dalam sebuah jaringan sosial. Karenanya, masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara terdampak corona harus melakukan upaya pencegahan penyebaran, yaitu dengan social distancing dan isolasi diri. Dengan langkah tersebut, seorang harus menanggung peran sebagai isolate yang berkonotasi negative: tidak memiliki power, kesepian, membosankan, dan sebagainya. Seorang isolate juga membuat kepadatan jaringan menjadi menurun dan tidak terpusat ditengah jaringan. Namun upaya dan pengorbanan untuk di isolasi ini sepadan dengan resiko yang harus dihadapi apabila mengabikannya. Karanea kita tidak kuasa menghentikan virus corona, maka yang dapat dilakukan adalah mencegahnya menyebar lebih luas.

Oleh sebab di bulan ramadhan ini dalam melakukan ibadah untuk sementara dilakukan dirumah masing-masing dan adalagi hal yang sangat menarik di tahun 2020 ini virus corona ini menjebabkan suatu tradisi yang biasanya tiap tahun dilakukan oleh masyarakt kita Indonesia yakni tradisi mudik atau pulang kedaerah asal menjadi hal yang sangat tabuh, hal ini disebabkan oleh anjuran pemerintah untuk tidak melakukan mudik, karena hal ini dilakukan agar virus yang ada tidak

menyebar kedaerah-daerah sehingga tradisi mudik menjadi ditiadakan ditahun 2020 ini.

Muh.Arif (2019), mengatakan bahwa lebaran: sudah usai,

menandakan berakhirnya waktu puasa. Luberan: meluber atau melimpah,ajakan bersedekah untuk kaum miskin. Pengeluaran zakat fitrah.

Kebijakan yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah memberlakukan karantina apabila ada masyarakatnya yang mudik ataupun pulang kampung untuk di Isolasi secara mandiri dan bahkan kepala desa atau lurah dan bahkan pada unsur perangkat pemerintah yang paling bawah adalah menyediakan tempat khusus dalam hal mengkarantina warganya yang baru pulang mudik ataupun pulang kampung dalam rentang waktu 14 hari sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hal ini di lakukan dalam rangka menghambat penyebaran virus Covid-19.

Dana Riksa Buana (2020), masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah untuk menanggulangi pandemic virus corona ini, diakibatkan oleh salah satu konsep didalam psikologi yang dinamakan bias kognitif. Bias kognitip adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat seseorang. Jenis Bias kognitif yang tepat menjelaskan fenomena ini adalah Bias Optimism, bias emosional, dan efek Dunning-Kruger. Untuk mengatasi bias kognitif ini langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.

Namun karena semakin besarnya keinginan masyarakat yang ditinggal di perantauan untuk mudik ataupun pulang kampung sehingga berbagai macam carapun dilakukan untuk

bisa pulang kampung hal ini disebabkan karena tradisi pulang kampung sudah mendarah daging dan sulit dilepaskan dan menjadi suatu tradisi yang harus di lakukan dalam rangka bersilahturahmi dengan sanak keluarga dan handai tolan, namun dengan adanya virus corona yang sedang mewabah hal ini menyebabkan terjadinya kendala dalam hal melakukan silaturahmi dengan tetangga dan sanak keluarga, namun pada tahun 2020 ini silaturahmi hanya dilakukan oleh keluarga inti saja dan tidak sedikit rumah yang tidak menerima kehadiran tamu dalam lebaran idul fitri tahun ini. Walaupun seyogyanya tradisi mudik lebaran ini dilakukan dikarenakan oleh keinginan yang tinggi untuk berkumpul dan bersilahturahmi dengan sanak keluarga dan disebabkan oleh virus corona menjadi terhambat meskipun sejatinya bila dipandang sisi teori migrasi menurut Bambang B. Seobyakto (2011), bahwa mudik lebaran dapat dikategorikan sebagai migrasi sirkuler karena sifatnya yang temporer dan dalam waktu yang singkat. Kegiatan ini sudah tentu akan menyebabkan suatu tempat akan mendapatkan manfaat yang cukup berarti terutama pendapatan tahunan bagi daerah tertentu, apalagi bagi orang yang berasal dari daerah tersebut banyak merantau ke kota besar. Terjadi perputaran pendapatan siklikal yang dilakukan oleh pemudik untuk halaman kampung mereka. Pendapatan dapat berupa langsung dari belanja yang dikeluarkan oleh perantau atau pemudik terhadap barang-barang hasil kerajinan baik berupa makanan atau barang lainnya. Transportasipun menerima pendapatan kenaikan yang cukup besar, termasuk biaya lainnya dengan adanya pandemic virus corana ini menyebabkan semuanya terjadi malah sebaliknya yang mudik dari perantau dan kembali ke kampus atau desa halamannya masing-masing

malahan tidak membawa apa-apa, hal ini disebabkan oleh mereka yang mudik ataupun pulang kampung ke daerahnya masing-masing sewaktu lebaran tidak mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) dan bahkan ada yang di PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) Yang disebabkan oleh ketidak mampuan perusahaan yang memperkerjaan mereka beroperasi seperti biasa sehingga tidak ada jalan lain adalah dengan mengurangi karyawan dan bahkan memberhentikan mereka dan akhirnya terpaksa pulang kampung atau mudik lebaran tanpa membawa hasil ataupun THR sehingga hal ini berpengaruh pada perekonomian di daerah dimana mereka berada dan malahan menjadikan beban baru bagi pemerintah daerah dengan bertambahnya masyarakatnya yang mudik ke daerah asal menjadi bertambahnya beban serta bertambahnya penganguran baru didaerah.

**BAB V Webinar Menjadi Sebuah Trand Di Masa**

**Pandemi Covid-19**

Virus corona atau covid-19 telah banyak merubah tatanan kehidupan didunia ini dari mulai yang paling sederhana sampai ke tatanan yang rumit dari mulai perekonomian, pendidikan dan lain lain, tak terkeculai dengan pertemuan ilmiah, wisuda dan lain-lain. Hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak atau menggumpulkan massa akan sangat dipengaruhi oleh situasi corona ini hal ini dikarenakan dilarangnya oleh pemerintah sehingga mengahsilkan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam acara pertemuan ilmiah ini dengan cara virtual atau melalui *video conference* baik melalui *cibsco weebek*, ngampus ataupun menggunakan zoom dan bahkan *you tube streaming* yang telah mewadai semua prakarsa kegiatan yang berkaitan mengumpulkan massa demi mencegah terjadinya penularan virus covid 19, maka diadakanlah semua kegiatan berbasis webinar dan hal ini menjadi kesempatan bagi para akademisi maupun yang lainnya dengan melakukan webinar dan hal ini dapat meningkatkan efiensi waktu maupun efesiensi biaya serta hal ini dapat melakukan banyak penghematan yang terjadi mulai dari akomodasi, hotel, makanan dan minuman serta biaya lainnya yang dapat di kurangi dan hal ini sangat membantu semua pihak tak terkecuali pemerintah maupun perguruan tinggi yang mengadakan acara webinar atau seminar online dapat berhemat dan mengurangi banyak sekali pebiayaan yang akan terjadi apabila mengadakan seminar melalui tatap muka.

Seminar *online* ini telah menjadikan sebuah babak baru dalam penggunaan IT yang semakin menjadi, dimana mau tidak mau dan bisa tidak bisa harus bisa beradapatasi pada kondisi saat ini dengan maraknya video conference ataupun seminar-seminar yang bersifat online, namun kebearadaan webinar ini dan penggunaan IT yang dirasakan melewati fase- fase yang seharusnya, namun dalam penggunaan IT Sebagai media komunikasi jarak jauh ataupun virtual seyogyanya masih dalam koridor yang semestinya dengan menjunjung etika dalam berkomunikasi walaupun komunikasi yang dilakukan melalui jarak yang jauh, namun etika dan perilaku dan sopan santun dalam melakukan webinar hendaknya masih bisa berlaku dalam kondisi negara kita yang masih menjunjung tinggi adat dan tata karma walaupun di jaman society 5.0 ini memaksa kita sebagai manusia harus bisa berkomunikasi dengan mesin dan ini menjadikan kita akan banyak sekali berhubungan dengan mesin, namun kita tetap harus terus menjada etika dan sopan santun serta tata karma kita dalam melakukan komunikasi baik secara verbal maupun non verbal.

Diera vandemi covid-19 ini menjadikan banyak sekali perubahan-perubahan yang dinggap ekstrim dan hal ini terkesan dipaksakan dikarenakan melampaui lompatan- lompatan karena tidak melalui fase-fase yang seharusnya.

Perubahan pada era pandemik covid-19 ini mengahsilkan respon ataupun tanggapan yang beraneka ragam baik positif maupun negatif yang diantaranya adalah: dimana webinar yag dilakukan tidak terikat ruang dan waktu dan pengetahuan tentang IT semakin berkembang dan dalam mengikuti acara webinar tidak perlu berdandan dan terkadang bisa dilakukan pada temapat dan waktu yang bisa disesuaikan

serta dapat melakukan kegiatan yang lain disamping kegiatan webinar yang dilakukan serta waktu yang digunakan lebih efektif dan efesien karena tidak perlu berpergian jauh dan tidak menggunakan SPPD sehingga biaya perjalanan dapat dihemat dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain.

Namun selain adanya yang berespon positif tentunya ada juga yang responnya negative terutama untuk orang yang Gaptek dan tidak mau belajar dengan perubahan yang ada dan hal ini dapat mengilas para responder negative karena tidak mengikuti perubahan zaman sehingga perubahan dapat memusnahkan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hal yang lain pula dapat direspon negative mengenai perangkat yang ada tidak memadai sehingga tidak dapat melakukan webinar ataupun video conference serta metode daring dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan IT yang berbasis internet terkadang menjadi kendala adalah bidang koneksi internet karena hal ini terkadang menjadi kendala sendiri dalam pemfaatannya. Namun hal ini juga dirasakan tidak mampu menyetuh kemampuan praktis karena hanya bersifat virtual dan tidak ada praktiuk ataupun bimbingan teknis yang disebabkan adanya pembatasan jarak pada masa pandemic covid-19 ini.

Dalam bidang pendidikan dirasakan oleh siswa, mahasiswa dan orang tua lebih banyak tugas dari pada kuliah ataupun tatap muka sehingga materi yang diajarkan dirasakan susah dipahami untuk beberapa mata kuliah atau mata pelajaran tertentu dan baik guru maupun dosen dirasakan tidak memberikan *feedback* hal ini dikarenakan baik guru maupun dosen serta peserta didik sama-sama belajar lagi teknologi.

hal yang dirasakan dalam dunia pendidikan sama juga dirasakan pada saat proses webinar yang dilakukan secara online terkadang susah menyentuh aspek praktisnya dan hanya bisa dalam tataran teori serta pengalaman yang dilakukan serta hal ini disampaikan oleh nara sumber terkadang tidak begitu saja gampang diserap oleh peserta webinar, namun hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi nara sumber dan peserta dalam memberikan pemahaman dan untuk memahami setiap materi yang diberikan diacara webinar tersebut.

Pada era *society* 5.0 dimana manusia harus selalu bisa berkomunikasi dengan mesin menjadikan manusia harus bisa beradaptasi pada perubahan ini dan hal ini menjadikan manusia terkadang melupakan hal-hal yang sangat penting dalam melakukan webinar diantaranya adalah etika, estetika, logika dan retorika.

Etika adalah standar baikdan buruk suatu hal untuk dilakukan. Dalam hal berkomunikasi etika ini terkadang dirasakan sangat perlu untuk orang yang masih memegang adat istiadat serta sompan santun dalam bertindak tanduk dan hal ini juga hendaknya bisa diterapkan pada acara webinar yang berlangsung diantaranya peserta juga harus berpakain yang sopan dan rapi serta berbicara deng tutur kata yang baik serta tidak sambil makan dan minum selama melakukan webinar. Selain etika dalam webinar seharusnya logika juga tetap harus dijalankan karena didalamnya ada juga nilai moral dan tata rma dan membuat kita berfikir secara logis, sistematis ataupun secara empiris dan pembicara dalam webinar seharusnya menggunakan retorika yang baik dalam penyampaiannya dimana retorika disini adalah teknik persuasi yang dilakukan dengan karakter yang dimiliki olehnya baik secara verbal

maupun non verbal. Selain hal tersebut yang sangat penting juga dalah mengenai estitika yang seharusnya selalu diterapkan dalam proses berlansungnya acara webinar dimanakan dapat dirasakan sesuatu hal yang diarsakan patut atau tidak serta pantas atau tidak.

**BAB VI Covid-19 Mengubah Wajah Pendidikan**

Masa darurat Covid-19 yang mengharuskan guru, dosen serta siswa dan mahasiswa belajar dari rumah nyatanya tidak serta merta mengubah lokasi dan metode dalam pembelajaran. Lebih besar dari itu covid-19 telah membuat banyak pihak melakukan perubahan yang sangat ekstrim dalam dunia pendidikan di Dunia termasuk di Indonesia hanya dalam hitungan bulan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran selama masa pandemi covid-19. Salah satunya adalah untuk mendorong guru, dosen untuk tidak fokus mengajar dan mengejar target materi pembelajaran dari kurikulum yang ada melainkan juga membekali siswa pada kemampuan hidup saat ini yang penuh dengan penguatan karakter.yang diantaranya; religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cintah tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggunga jawab. Dimana pandemic ini mengakibatkan penanaman karakter yang diharapkan muncul pada setiap kompetensi inti maupun kompetensi dasar dalam satuan mata pelajaran menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik hal ini diakibatkan pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh atau dengan daring.

Pendidikan jarak jauh atau mengunakan jaringan (daring) mempunyai tujuan agar pembelajaran jarak jauh tidak membebani guru, dosen ataupun orang tua, terutama siswa sebagai sosok penting dalam pendidikan. Penyesuaian tersebut

tertuang dalam surat edaran Nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan covid-19 di lingkungan kemendikbud serta surat edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan covid-19 pada satuan pendidikan.

pandemic covid yang kehadirannya banyak mengubah semua sendi kehidupan hal ini pun tak terkecuali wajah dunia pendidikan kita mulai dari metode pembelajaran, strategi pembelajaran serta sasaran yang ingin dicapai. Metmorfosis ini mebutuhkan adaptasi yang tidak sebentar agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif. Dalam proses belajar mengajar guru, dosen dan mahasiswa tidak lagi harus bertatap muka secara langsung dan dilakukan melalui daring ( dengan jaringan) dengan memanfaatkan teknologi. Seluruh penyelenggraan pendidikan mulai dari tingkat sekolah sampai universitas melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar meskipun peserta didik berada dirumah.

Semua aktivitas pendidikan yang dilakukan serta proses pembelajaran yang diharapkan serta dituntut lebih memanfaatkan teknologi yang ada dengan protocol kesehatan covid-19 social distancing saat pandemic covid-19. Media pembelajaran perlu lagi didesain secara kreatif dan inovatif sehingga lebih menarik minat belajar peserta didik dimanapun dan kapanpun. Selain ituyang tidak kalah pentingnya adalah sinergitas antara orang tua dengan penyelenggra pendidikan sebagai penentu kesuksesan belajar, orang tua dirumah memiliki peran strategis dan tidak hanya sebagai fasilitator dan mediator, tetapi juga sebagai mediator, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar yang lebih baik lagi.

Luthra & Mackenzi (2020) menyebut ada empat cara covid-19 telah mengubah cara kita dalam mendidik generasi masa

depan. **Pertama** bahwa proses pendidikan diseluruh dunia semakin terhubung dengan tidak mengenal jarak dan waktu. **Kedua**, pendefinisian ulang peran pendidikan, **Ketiga** mengajarkan pentingnya keterampilan hidup dimasa depan. Dan, **keempat** membuka luas peran teknologi dalam menunjang pendidikan.

Selain itu, Tam & El Azar (2020) menyatakan pandemic virus corona menyebabkan tiga perubahan mendasar didalam pendidikan global. **Pertama** mengubah cara jutaan orang dididik. **Kedua**, solusi baru pendidikan yang dapat membawa inovasi yang sangat dibutuhkan. **Ketiga**, adanya kesenjangan digital menyebabkan pergeseran baru dalam pendekatan pendidikan dan dapat memperluas kesenjangan.

Apa yang disampaikan Luthra & Mackenzi (2020) maupun Tam dan El Azar (2020) menunjukkan betapa covid-19 telah membuat percepatan dalam transformasi bidang pendidikan. Dimana transformasi ini harus terjadi dimana perubahan yang adalah sebuah keniscayaan yang bisa tidak bisa dan mau tidak mau kita harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut walaupun dalam proses yang sangat lambat dan disebabkan oleh corono virus ini mau tidak mau harus dilakukan. Dalam waktu yang sangat singkat misalnya seluruh dunia mengubah pola pembelajaran konvensional berbasis tatap muka disekolah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sangat mengandalkan teknologi.

Hoskin (2013) menyebut tidak mudahnya melakukan pembelajaran jarak jauh di kalangan dikalangan mahasiswa padahal pembelajaran ini harus didukung oleh desain kelas dan metode penyampaian yang tepat sehingga pembelajaran daring dapat mendorong mahasiswa mampu untuk merefleksikan

kepercayaan mereka; menyediakan lingkungan yang aman untuk mendiskusikan berbagai perspektif; membimbing mereka untuk mengeksplorasi; memvalidasi dan memperluas pandangan baru; dan mendukung mereka dalam tuntutan sebagai peran yang baru dalam mengembangkan pendidikan. Selain itu akses dalam pengunaan teknologi menjadi kata kunci bagi optimalnya pembelajaran daring. Lembani dkk (2019) menyebut *open distance learning* dalam meningkatkan peluang bagi akses dalam pendidikan karena tersedianya materi daring. Namun kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh beragam variabel seperti umur, akses terhadap computer dan internet, maupun kesenjangan digital. Memfasilitasi akses yang memadai adalah salah satu hal yang mendasar dalam mendukung kelancaran *open distance learnin*g.

Di Indonesia pembelajaran daring/ jarak jauh diatur melalui Surat Edaran Kemendikbud No 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Corona Virus Disease (Covid-19). Ada tiga poin kebijakan terkait pembelajaran daring. **Pertama**, pembelajaran daring/ jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan mentuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. **Kedua**, dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemic covid-19. **Ketiga**, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar dirumah. Namun kemudian, secara empiric realisasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor. **Pertama**, pemeritah pusat mesti menjamin dengan menyediakan koneksi internet yang lancar

dan stabil, subsidi kuota, bantuan perangkat digital, dan peningkatan kapasitas digital juga meminimalisir ketimpangan akses diberbagai wilayah. Harus ada alokasi anggaran secara khusus untuk mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran daring tersebut.

Pembelajaran daring tidak dapat dilakukan jika sekolah atau perguruan tinggi maupun orang tua tidak memiliki capital yang memadai untuk mengakses perangkatnya. Pembelajran ini tidak akan terjadi ketika guru, dosen mahasiswa ataupun siswa tidak memiliki computer, handphone, atau kuota dan jaringan internet yang memadai. Beruntung, belakangan pemerintah membolehkan anggaran dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) untuk mendukung pelaksanaan pembelajran daring. Pemerintah juga bekerjasama dengan TVRI untuk menampilkan program edukasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan waktu dan hari yang disediahkan. Pemerintah daerah berperan untuk memetakan sekolah- sekolah yang membutuhkan bantuan dalam penyelenggaraan pembelajaran daring. Khusus untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan akses, pemerintah harus memiliki solusi konkrit, tanpa itu semua anak-anak dari keluarga miskin akan semakin termarjinalkan karena tidak mendapatkan haknya dibidang pendidikan.

Data BPS (2019) perlu menjadi pertimbangan dalam kondisi penggunaan internet dikalangan pelajar. Merujuk pada data tersebut, penggunaan telepon seluler oleh siswa perkotaan lebih tinggi dibandingkatn di perdesaan yaitu 76,60 persen berbanding 64,69 persen. Sementara itu persentase siswa yang menggunakan computer/PC diperkotaan dua kali lipat. dibandingkan siswa dipedesaan yairu 31,37 persen berbanding

15,43 persen. Kemudian, persentase penggunaan internet siswa daerah perkotaan (62,51 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (40,53 persen). Secara nasional, terdapat

53,06 persen siswa usia 5-24 tahun yang menggunakan internet.

**Kedua**, kapasitas sekolah bergantung pada capital yang dimiliki oleh sekolah seperti infrastruktur yang mendukung operasionalisasi pembelajaran secara daring anatara lain koneksi internet, kuota, laptop, dan penguasaan teknologi. Latar belakang siswa secara sosial ekonomi juga sangat memengaruhi apakah kegiatan belajar jarak jauh melalui beragam perangkat daring (*Zoom*, *Google meet*, *webex* , dsbnya) dapat optimal dilakukan.

Perguruan tinggi baik diperkotaan maupun diperdesaan yang memiliki input mahasiswa yang berbeda-beda baik dari sisi kemampuan intelektual dan kemampuan sosial ekonomi akan sangat dipengaruhi kemampuan secara ekonomi dalam rangka mengakses internet dalam rangka mewujudkan pembelajaran secara darin ataupun online.

**Ketiga,** kreativitas dosen dalam mendesain pembelajaran daring bagi siswa juga memegang peranan penting untuk memastikan pembelajaran menjadi menyenangkan, penuh makna, membangkitkan kreativitas, daya kritis dan mampu membuat mahasiswa mandiri sudah tentu bukan perkara mudah. Apalahi dosen tidak dapat secara langsung berhadap- hadapan dengan mahasiswa. Kejelian dosen dalam membuat desain dan metode yang mampu memikat serta menstimulasi mahasiswa untuk terus bersemangat belajar menjadi sesuatu yang harus menjadi pertimbangan. Karena pembelajaran jangan sampai menjenuhkan bagi mahasiswa yang dibebakan

hanya memberikan tugas saja tanpa menjelaskan apa-apa dalam hal pemberian materinya.

**Keempat**, Partisipasi orang tua menjadi sangat penting untuk

menyukseskan pembelajaran daring. Situasi dilematis kemudian terjadi antara orang tua tidak dapat hadir mendampingi anak karena mashi harus bekerja.

Pembelajaran daring telah membuka berbagai promblema pendidikan dinegeri ini diantaranya adalah; membuat jarak komunikasi antara dosen dan mahasiswa; akses dalam perkuliahan terkadang terkendala dengan sinyal yang ada; pemebelajaran yang terkadang ada mata kuliah yang berbenturan dalam satu waktu; Semangat belajaryang menurun; terkang akses internet yang lemot mengakibatkan mahasiswa tertinggal dalam materi perkuliahan yang dilakukan melalui daring; metode belajar dosen harus didesain dengan baik agar gampang dimengerti; belajar dirasakan kurang efektif.

**BAB VII Covid-19 dan Dunia Kesehatan**

Semakin lama semakin merajalelanya virus covid-19 di dunia mengakibatkan banyak negara yang melakukan lockdown yang mana tadinya banyak negara yang acuh tak acuh akan pandemic yang terjadi, namun lama kelamaan semakin menjadi sehingga banyak negara di dunia yang kewalahan dalam menghadapi pandemic ini tak terkecuali negara super power Amerika serikat dan beberapa negara eropa itali yang sangat terpuruk disebabkan oleh pandemic covid-19

ini.

Indonesia sebagai negara yang kurang tanggap mengenai pandemik ini mengalami juga peningkatan jumlah kasus positif dari hari kehari dan bahkan sudah semakin banyak pasien yang dirawat dan di isolasi diberbagai daerah baik kabupaten maupun provinsi yang ada di Indonesia. berbagai protokola kesehatan mulai diberlakukan oleh semua sendi kehidupan termasuk dalam hal kesehatan mulai mengunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer serta penggunaan APD ( Alat Pelindung Diri) bagai tenaga medis dan kesehatan serta pengaturan jarak social distancing serta physical distancing dalam kebijakan oleh pemerintah melalui PSBB ( pembatasan Sosial berskala Besar).

Pandemi virus corona masih terus menghantui dunia. Hingga kini, kasus positif virus corona masih mengalami lonjakan. Meski begitu, banyak juga pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Tetapi, banyak juga korban yang meninggal dunia akibat virus corona.

Dalam semua peristiwa yang terjadi di dunia ini tentu ada hal yang berdampak positif tak terkecuali dengan pandemic covid-

19 ini, diantaranya adalah: **Pola Hidup Bersih dan sehat**, seperti yang sudah di programkan oleh pemerintah melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi terimplementasi dengan baik dari semua kalangan masyarakat karena pandemic ini telah membuat semua masyarakat melalukannya agar terhindar dari virus Covid-19 diantaranya adalah dengan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sehingga bisa terhindar dari virus yang tengah mewabah ini dan pola hidup sehat ini sepertinya akan menakdi kebiasaan baru pada kondisi new normal saat ini dan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri akan lebih terjaga sehingga dapat menciptakan hidup yang lebih sehat lagi.

**Keluarga Lebih Harmonis**, Pandemi corona ini menyebabkan rutinitas ataupun kesibukan menjadi dilakukan di rumah atau *Work From Home* (WFH) sehingga orang tua yang biasanya sibuk di kantor berangkat pagi dan pulang cenderung sudah malam pada masa pandemic ini menyebabkan orang tua lebih banyak intensitasnya dirumah dan bertemu serta berkomunikasi dengan anak-anak sehingga menjadikan ikatan pada keluarga inti menjadi lebih terjadi disebabkan oleh komunikasi yang baik pada setiap komponen pada keluarga inti dan hal ini juga menyebabkan keluarga inti tidak banyak kegiatan keluar rumah sehingga keutuhan keluarga jadi lebih terjaga.

**Tidak Gagap Teknologi,** di era pandemic covid-19 ini menjadikan orang tua yang tadinya sedikit tidak peduli ataupun tidak mau tahu dalam hal teknologi tiba-tiba menjadikan bahwa penggunaan teknologi terutama dibidang IT menjadi suatu kewajiban dimana semua informasi yang terkait dengan pandemic bisa diketahui melalaui media informasi baik melalui Hp ataupun lainnya dan hal ini membuat semua masyarakat

dapat mengakses ilmu pengetahuan ataupun informasi sehingga tidak gagap teknologi lagi dan pada masa pandemic ini juga menajdikan orang tua harus lebih aktif dalam memantau proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2020 hal ini menjadikan orang tua harus bisa beradapatasi dengan teknologi sehingga dapat mendaptarkan anaknya ke sekolah yang akan dituju dari proses awal sampai selesai pendaftaran dan pengumumannya melalui media informasi yang harus dapat di akses oleh orang tua maupun siswa. Dan yang lebih mewabah saat ini adalah Webinar atau *Web* seminar menjadi sebuah trend baru pada masa pandemic covid-19 ini walaupun jarak yang jauh menjadikan terasa dekat dengan akses *zoom*, *webex* dan lain- lain sehingga tidak ada jarak dan waktu dalam proses pertukaran infromasi ataupun berbagi ilmu pengetahuan melalui jaringan virtual termasuk juga dalam proses pembelajaran saat ini dilakukan melalui daring sehingga membuat peserta didik dan orang tua mau tidak mau dan bisa tidak bisa harus bisa beradaptasi pada kebiasaan penggunaan teknologi ini agar tidak ketinggalan dalam berbagai bidang. **Konsumsi Vitamin dan Herbal,** pada masa pandemic corona ini yang gejalanya salah satunya adalah disebabkan oleh imunitas tubuh yang turun dan pada masa pandemic ini menyebabkan masyarakat lebih rutin mengkonsumsi vitamin dan mineral sebagai suplemen dalam meningkatkan ketahan tubuh agar tidak terserang oleh penyakit terutama virus covid-

19 ini dan jamu menjadi salah satu alternatif dalam hal menjaga kesehatan dalam menangkal penyakit yang disebabkan oleh virus korona tersebut dan jamu ini termasuk didalamnya penggunaan obat-obat herbal ataupun yang dikenal dengan jamu sehingga masyarakat lebih sehat dalam hal

meningkatkan imunitas tubuh sehingga dapat menghalangi penyakit datang dan menyerang tubuh sehingga tidak sakit baik disebabkan oleh virus maupun bakteri.

**BAB VIII Penggunaan Masker dan APD**

Untuk mencegah meluasnya penularan virus covid-19 ini masyarakat seluruh Indonesia dihimbau untuk menjaga jarak dalam berbagai kegiatan serta penggunaan masker apabila melakukan bepergian dan keluar rumah dalam rangka membeli kebutuhan untuk bisa bertahan hidup dan hal ini juga didukung oleh berbagai toko atau mini market tempat berbelanja sudah menerapkan protokol kesehatan setiap masyarakat yang mau berbelanja kebutuhan sehari-hari di perikksa dengan alat pengukur suhu serta harus menggunakan masker baru dipersilahkan masuk untuk berbelanja, hal ini juga termasuk instansi yang melayani masyarakat umum menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker dan menjaga jarak dalam menerima pelayanan. Hal ini juga tak terkecuali di rumah sakit untuk semua petugas kesehatan baik dokter maupun perawat harus menggunakan APD ( Alat Pelindung Diri) dalam rangka mencegah dirinya dalam hal ini dokter dan perawat tertular virus corona dan tidak sedikit para dokter maupun perawat tertular virus covid-19 dan meninggal dunia. Penerapan penggunaan masker dan APD ini sangat penting dalam rangka memutus mata rantai penularan virus korona ini disemua sektor dan diharapkan semua masyarakat patuh pada protokol ini dan tetap menjaga *social distancing* maupun *physical distancing.*

**Daftar Pustaka**

Boehnke, M., Pokharel, S., Nyberg, E., & Clark, T. (2018).

Financial education for radiology residents: Significant improvement in measured financial literacy after a targeted intervention. *Journal of the American College of Radiology*, *15*(1), 97–99.

Brown, S., &Taylor, K. (2016). Early influences on saving behaviour: Analysis of British panel data Journal of Banking & Finance 62 (2016) 1–14.

Departemen Koperasi dan UKM, 2017

Desiyanti R, 2017, Manajemen Keuangan, Bung Hatta

University Press, Edisi kedua.

Desiyanti R, 2017, Manajemen Investasi dan Portofolio, Bung

Hatta University Press, Edisi kedua

Fernandes, D., Lynch Jr, J. G. and Netemeyer, R. G., 2014.

Financial literacy, financial Education, And Downstream Financial Behaviors. *Management Science,* 60(8), Pp. 1861- 1883.

Grohmann, A., Kouwenberg, R., & Menkhoff, L. (2015).

Childhood roots of financial literacy. *Journal of Economic Psychology*, *51*(September), 114–133. doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.002

[https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/dampak-](https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/dampak-pandemi-covid19-terhadap-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-umk-di-sumatera-barat-dan-kebijakan-pemerintah-untuk-mengatasinya/) [pandemi-covid19-terhadap-pertumbuhan-usaha-mikro-](https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/dampak-pandemi-covid19-terhadap-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-umk-di-sumatera-barat-dan-kebijakan-pemerintah-untuk-mengatasinya/) [kecil-umk-di-sumatera-barat-dan-kebijakan-pemerintah-](https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/dampak-pandemi-covid19-terhadap-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-umk-di-sumatera-barat-dan-kebijakan-pemerintah-untuk-mengatasinya/) [untuk-mengatasinya/](https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/dampak-pandemi-covid19-terhadap-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-umk-di-sumatera-barat-dan-kebijakan-pemerintah-untuk-mengatasinya/)

[https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/peluang-](https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/peluang-umkm-dengan-menggunakan-bisnis-online-dan-fintech-dimasa-pandemi-covid-19/)

[umkm-dengan-menggunakan-bisnis-online-dan-fintech-](https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/peluang-umkm-dengan-menggunakan-bisnis-online-dan-fintech-dimasa-pandemi-covid-19/) [dimasa-pandemi-covid-19/](https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/peluang-umkm-dengan-menggunakan-bisnis-online-dan-fintech-dimasa-pandemi-covid-19/)

Kaiser, T. and Menkhoff, L., 2016. Does Financial Education Impact Financial Behavior, And If So, When?. *Working Paper.*

Mandell, L, 2008, the financial literacy of young american adult: Results of the 2008 national jump start coalition survey of high school seniors and college students. <http://www.jumpstart.org/assets/files/2008-SurveyBook>

Mihalcová,B; Csikósová, A; Antošová, M, 2014, Financial literacy – the urgent need today, Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 ( 2014 ) 317 – 321.

Miller, M., Reichelstein, J., Salas, C. and Zia, B., 2015. Can you help Someone Become Financially Capable? A Meta-Analysis Of The Literature. *World Bank Research Observer,*30(2), pp. 220-246.

**RIWAYAT PENULIS**

Penulis dilahirkan dan dibesarkan di Kota Lubuk- linggau tepatnya di ujung provinsi Sumatera selatan 41 tahun lalu, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA di tempuh di Lubuk-linggau dan kemudian melanjutkan Kuliah di Bandung baik S-1, S-2 maupun S-3 dan bidang keahlian tentang Perilaku Organisasi terutama Birokrasi dan disertasi yang diambil berkaitan dengan Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Penulis juga aktif dalam bidang pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan sudah mengabdi dibeberapa kampus sebagai Dosen diantaranya: STKIP Pasundan, STT Bandung, UNPI Cianjur serta beberapa PTS Di bandung maupun Jakarta dan sekarang sebagai dosen tetap ber *homebase* di STIA Setih Setio Muara Bungo dimulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Terkait dengan Jabatan struktural yang pernah di emban mulai dari Kepala penjaminan Mutu sampai Wakil Ketua I Bidang Akademik di STIA Setio Muara Bungo dan sampai saat ini masih aktif dalam menulis dan tidak kurang dari 104 judul artikel yang sudah dihasilkan diterbitkan baik terindeks sinta 2, 3, 4 maupun 5 dan prosiding yang sudah terindeks scopus, penulis juga aktif mengisi dalam berbagai seminar baik lokal, nasional maupun internasional baik sebagai pemakalah maupun *keynote speaker* dan penulis juga aktif mengisi artikel pada beberapa media Koran lokal baik cetak maupun *online*.

Buku yang sudah diterbitkan antara lain ; Patologi birokrasi dalam pelayanan public, Kereta troika dalam pelayanan publik di era revolusi 4.0, Metode penelitian dalam kerangka patologi birokrasi, Perilaku organisas serta pemegang

Hak Karya Cipta (HakI) untuk 5 karya cipta dengan kode EC00202000926, EC002009186, EC002000927, EC00202000928, EC00201972499

**RIKA DESIYANTI** lahir di Padang pada tanggal 8 Desember 1974. Menamatkan Sekolah Dasar (1987) pada SDN No 11 Padang. Tamat dari SMP 1



Padang (1990), Tamat dari SMA 1 Padang (1993), memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bung Hatta (1997) dan memperoleh gelar M.Si pada Program Studi Manajemen Magister Sains

Universitas Gadjah Mada (2004). Sedang menyelesaikan studi

S3 di program Doktor Manajemen Unisel Malaysia.

Saat ini aktif sebagai Staf Pengajar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Sebagai Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta. Pernah sebagai Instruktur pelatihan komputer. Telah menulis beberapa artikel dan penelitian serta mempunyai minat penelitan dibidang Manajemen secara luas, Manajemen Keuangan, dan bidang Investasi Portofolio dan Pasar modal. Juga telah menulis buku-buku antara lain Manajemen Investasi & Portofolio Jilid 1 dan Manajemen Investasi & Portofolio Jilid

2. Menulis buku Teori Investasi dan Portofolio, Buku

Manjemen Keuangan dan buku Manajemen Operasi.